

IMPLIKASI PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT DARI *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION* (JCPOA)

Makruf Baiturohim

Mahasiswa Departemen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
E-mail : makrufbaiturohim@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Konflik selama beberapa dekade antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan program nuklir Iran berhasil dilunakkan dengan adanya Kesepakatan Nuklir Iran. Kesepakatan Nuklir Iran atau yang lebih dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ditandatangani oleh Iran dengan kelompok negara P5+1 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Jerman pada 14 Juli 2015 di Wina, Austria. Kesepakatan tersebut memungkinkan Iran untuk mempertahankan sebagian substansial dari infrastruktur nuklirnya dalam batasan tertentu - khususnya kemampuannya untuk memperkaya uranium menjadi bahan fisil, bahan yang dibutuhkan dalam senjata nuklir. Dalam perjalanannya, AS dibawah kepemimpinan Donald Trump pada 8 Mei 2018 memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan dengan alasan bahwa kesepakatan ini adalah hasil negosiasi mengerikan Iran yang tidak akan membawa ketenangan dan kedamaian. Rumusan masalah yang

diangkat terkait dengan implikasi penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir Iran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan sumber data sekunder sebagai acuan utama. Metode pendekatan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perjanjian, dan historis. Hasil penelitian didapatkan bahwa penarikan diri AS dari kesepakatan ini disertai dengan penerapan kembali sanksi terhadap Iran berimplikasi pada terganggunya perekonomian Iran yang berdampak pada keputusan Iran untuk tidak lagi mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang ada. Insiden-insiden yang belakangan terjadi kepada sosok penting di Iran akibat ulah AS juga semakin meningkatkan tensi konflik karena Iran semakin menunjukkan aktivitasnya dalam program nuklir yang melewati batas. Tindakan penarikan diri AS dari kesepakatan merupakan sebuah bentuk vandalisme diplomatis yang tidak perlu terjadi mengingat dampaknya yaitu pada stabilitas dan kondusifitas global.

Kata Kunci: *Kesepakatan Nuklir Iran, JCPOA, Program Nuklir, Penarikan Diri, Implikasi*

Abstract

The decades-long conflict between Iran and the United States (US) over the Iranian nuclear program was tempered by the Iran Nuclear Deal. The Iran Nuclear Deal or better known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) was signed by Iran with the P5 + 1 group of countries, namely the United States, Britain, France, China, Russia, and Germany on July 14 2015 in Vienna, Austria. The deal allows Iran to maintain a substantial portion of its nuclear infrastructure within certain limits - specifically its ability to enrich uranium into fissile material, a material

required in nuclear weapons. On its way, the US under the leadership of Donald Trump on May 8 2018 decided to withdraw from the deal on the grounds that this agreement was the result of terrible Iranian negotiations that would not bring calm and peace. The formulation of the issues raised relates to the implications of US withdrawal from the Iran nuclear deal. This study uses a normative juridical method by emphasizing the use of secondary data sources as the main reference. The approach method uses a conceptual approach, case approach, agreement approach, and historical approach. The results showed that the US withdrawal from this deal accompanied by the reimposed of sanctions against Iran had implications for disrupting the Iranian economy which resulted in Iran's decision to no longer comply with and implement the existing deal. The incidents that recently happened to important figures in Iran as a result of the actions of the US have also increased the tension of the conflict as Iran has increasingly shown its activities in the nuclear program which crossed borders. The US withdrawal from the deal constitutes a form of diplomatic vandalism that does not need to occur considering its impact on global stability and conduciveness.

Keywords: *Iran Nuclear Deal, JCPOA, Nuclear Program, Withdrawal, Implications*

Pendahuluan

Dewasa ini, isu nuklir sudah menjadi rahasia umum yang diketahui masyarakat luas. Dalam perspektif masyarakat umum, alih-alih dihubungkan dengan aspek penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik, isu nuklir justru dinarasikan sebagai senjata pemusnah massal. Hal itu dapat dimaklumi mengingat tingginya tensi politik saat ini antar negara-negara di dunia. Isu tentang

pengembangan senjata nuklir merupakan salah satu bagian dari beberapa isu politik dunia di era globalisasi dan telah melewati batas-batas wilayah. Isu tentang perkembangan nuklir sudah menjadi pembicaraan global sejak tahun 1945. Sejak saat itu, isu ini telah menjadi komoditas hubungan antara militer dan politik yang ramai 'diperdagangkan'.

Sejatinya, motivasi dan kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara yang ada di dunia ini sudah berlangsung sejak lama. Jauh sebelum perang dingin berakhir beberapa negara berupaya untuk mengembangkan program nuklir dan memiliki senjata nuklir. Terdapat tiga buah alasan penting yang memotivasi mereka untuk memiliki senjata pemusnah massal tersebut. Ketiga hal tersebut adalah alasan strategi, politik dan prestis (Purwanto, 2011). Alasan strategi karena senjata nuklir memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengamankan negara mereka dari serangan musuh dari luar, hal tersebut sesuai dengan konsep *deterrence* yaitu sebuah upaya untuk mencegah ancaman militer dari pihak lain agar tidak melakukan tindakan agresif atau serangan militer dengan istilah lain *war prevention* dan hal tersebut lebih berfokus pada *psychological war* daripada bersifat fisik. Sedangkan untuk alasan politik dan prestis, negara yang memiliki senjata nuklir secara sederhana dapat meningkatkan bargaining position nya dalam percaturan politik internasional maupun dalam hal melakukan negosiasi bilateral.

Salah satu negara yang terkenal akan program nuklirnya adalah Republik Islam Iran. Program nuklir Iran sendiri dimulai tahun 1957 atas bantuan AS dimana saat itu hubungan Iran-AS sedang dalam kemesraan yang tinggi. Namun, majunya perkembangan program nuklir Iran dibarengi dengan gulingnya rezim Iran yang

saat itu dibawah pemerintahan boneka AS, Shah Reza Pahlevi dan beralih kepada Ayatollah Khoemeini yang anti-AS (dan Barat) kemudian memunculkan kekhawatiran akan perkembangan program nuklir Iran. Program nuklir Iran selama lebih dari empat dekade telah menjadi masalah kontroversial antara Iran dan Barat; bahkan mengancam akan berkembang menjadi konfrontasi militer antara Teheran dan musuh bebuyutannya, Washington (Tarock, 2016). Program nuklir Iran kemudian menjadi penyebab konflik berkepanjangan selama puluhan tahun antara Iran dan AS. Untuk mengendalikan aktivitas program nuklir Iran tetap dibawah standar aman, AS yang saat itu dibawah rezim Presiden Barrack Obama kemudian menarik Iran yang dibawah rezim Presiden Hassan Rouhani ke dalam langkah-langkah diplomasi yang kemudian menelurkan apa yang disebut dengan Kesepakatan Nuklir Iran.

Kesepakatan Nuklir Iran atau dikenal dengan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* ditandatangani oleh Iran dengan kelompok negara-negara terkuat dunia pemegang hak veto PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Jerman pada tahun 2015 lalu. Sebagaimana dijelaskan diatas, kesepakatan nuklir ini dilatarbelakangi oleh aktivitas perkembangan nuklir Iran yang dianggap dapat membahayakan kondusifitas dunia internasional. Atas aktivitas nuklir ini, AS dan negara-negara Barat sempat menjatuhkan sanksi ekonomi yang mengucilkan Iran dari perbankan dan perdagangan minyak dunia serta pembekuan aset Iran di luar negeri (Laub, 2015). Sanksi ini dijatuhkan dengan tujuan untuk melemahkan posisi Iran sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan program senjata nuklirnya (Paramasatya & Wiranto, 2019). Pada kenyataannya sanksi tersebut berhasil untuk

melemahkan perekonomian Iran namun tidak cukup efektif secara politik sebab pemerintahan Iran tetap kuat, hal ini menyebabkan Iran masih terlibat dalam berbagai konflik di kawasan dan masih bersikeras mengembangkan pengayaan uraniumnya. Atas dasar tersebut, negara-negara barat kemudian berusaha menarik Iran ke dalam sebuah perundingan yang dianggap cukup memberikan keuntungan bagi Iran, dengan tawaran bagi Iran untuk mengekang aktivitas nuklir mereka dalam batasan-batasan tertentu dengan kompensasi pengangkatan sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS negara-negara barat terhadap Iran secara bertahap (Nainggolan, 2015). Hasilnya, lahirlah kesepakatan nuklir Iran tersebut dengan 159 halaman dan 5 annexes. Kesepakatan itu memberikan jaminan yang dapat diverifikasi bahwa bahan fisil di Iran tidak dapat dialihkan untuk tujuan persenjataan; standar tertinggi tentang transparansi dan inspeksi nuklir yang pernah dinegosiasikan; dan pencabutan sanksi terkait nuklir AS dan PBB terhadap Iran. Perjanjian tersebut disambut baik oleh komunitas internasional dan didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB (Seyed & Mohammad, 2017).

Dalam perjalanannya, konsistensi negara anggota kesepakatan nuklir Iran untuk melaksanakan kesepakatan ini tergerus oleh kepentingan politik negara tersebut. Amerika Serikat (AS) dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump pada 8 Mei 2018, menarik diri secara sepihak (*unilateral*) dari kesepakatan nuklir Iran tersebut dan kembali menerapkan sanksi terhadap Iran.

Penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir Iran menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan. Keputusan penarikan diri AS ini disambut baik oleh negara-negara yang membenci kesepakatan nuklir Iran tersebut, diantaranya Israel, Arab Saudi, dan kesultanan-

kesultanan Arab di wilayah lainnya. Disisi lain, keputusan ini ditentang oleh banyak pihak, termasuk negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan. Alasannya, kesepakatan ini dianggap sebagai cara paling memungkinkan untuk memperlambat aktivitas nuklir Iran dan membuat Iran tetap berada di bawah kendali. Banyak pihak menganggap bahwa kesepakatan ini tidak membawa perubahan yang signifikan pada perilaku Iran. Justru sebaliknya, segera setelah kesepakatan ini ditandatangani, Garda Revolusi Islam (*Guardian of the Islamic Revolution/GIR*) meluncurkan program rudal jangka panjang yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2231, yang melarang Iran mengembangkan program rudal selama delapan tahun. Disisi lain, negara-negara yang tergabung di dalam 5P+1 justru menyayangkan keputusan Trump tersebut dan menyatakan bahwa Iran telah mematuhi isi kesepakatan dan telah di verifikasi oleh pihak IAEA. Kini, Iran ingin menagih janji atas imbalan yang dijanjikan dalam kesepakatan tersebut yang berupa pengangkatan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepadanya secara bertahap. Namun, bukannya mencabut sanksi-sanksi tersebut, Trump ingin melakukan negosiasi ulang kesepakatan sebagai salah satu agenda politik luar negerinya dengan menyatakan jika ia berhasil mengubah kesepakatan tersebut, maka kesepakatan tersebut akan sama sekali berbeda.

Sesaat setelah penarikan diri tersebut, Hassan Rouhani menyatakan bahwa Iran akan tetap berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang tersisa selama Iran mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan tersebut. Disisi lain, pihak-pihak yang tersisa memiliki posisi tawar yang lemah untuk memaksa Iran agar tetap mematuhi kesepakatan, yang dapat berakibat pada Iran akan meninggalkan kesepakatan tersebut jika sanksi yang

kembali dijatuhkan AS merusak perekonomian negaranya. Namun, tepat setahun setelah AS menarik diri, Iran memberikan batas waktu 60 hari kepada lima negara lain yang menandatangani kesepakatan nuklir yakni China, Prancis, Jerman, Rusia dan Inggris, untuk melindunginya dari sanksi AS. Iran juga menegaskan masih ingin menyelamatkan kesepakatan itu, tapi menyalahkan negara-negara Eropa yang disebutkan gagal memenuhi komitmen mereka sendiri. Iran kemudian menegaskan akan meningkatkan produksi pengayaan uranium, yang bisa digunakan membuat bahan bakar reaktor sekaligus senjata nuklir. Meskipun membantah bahwa keras bahwa mereka berniat untuk membangun senjata nuklir tetapi hanya untuk menyediakan bahan bakar bagi pembangkit listrik di Bushehr, tetap saja tindakan tersebut melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Melihat pada apa yang terjadi baru-baru ini terkait dengan ketegangan kedua negara, yaitu tewasnya Qasem Soleimani, pemimpin pasukan elite Quds yang menjadi bagian Garda Revolusi Iran, yang tewas akibat serangan udara oleh militer Amerika Serikat di Baghdad, Irak pada tanggal 3 Januari 2020, berbuntut panjang dan semakin menaikkan tensi konflik kedua negara. Atas tragedi ini, dalam pernyataan resminya, pemerintah Iran menegaskan tidak lagi menaati pembatasan kapasitas pengayaan uranium, taraf pengayaan, jumlah penyimpanan materi pengayaan, atau riset dan pengembangan. Artinya, Iran tidak akan lagi menaati kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, tewasnya ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh pada 27 November 2020, yang dituduh oleh negara Barat dan Israel sebagai otak dibalik proyek senjata nuklir rahasia Iran juga kembali meningkatkan tensi konflik. Iran menuduh Israel yang notabennya adalah anak kesayangan AS sebagai pihak yang

bertanggung jawab atas tewasnya Mohsen Fakhrizadeh. Presiden Iran, Hassan Rouhani dan Pemimpin Spiritual Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei berjanji akan melakukan pembalasan atas pembunuhan ilmuwan nuklir Iran tersebut. Sama seperti pemimpin-pemimpin Iran sebelumnya, keduanya menegaskan bahwa Pemerintah Iran tidak pernah berupaya membuat senjata nuklir seperti yang dituduhkan, dilain sisi juga berjanji untuk melanjutkan kerja Fakhrizadeh. Hal ini menandakan bahwa program nuklir Iran telah menjadi sajian utama dalam konflik yang berkepanjangan tersebut.

Melihat fenomena tersebut, penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir Iran ini tentunya menimbulkan dampak yang besar dan membuka babak baru atas suatu konflik yang sudah dijeda. Penarikan diri AS, dan juga terbunuhnya Qasem Soleimani dan Mohsen Fakhrizadeh pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap banyak hal, diantaranya keberlangsungan hidup kesepakatan ini ke depannya dengan negara-negara anggota yang tersisa, kembali memanasnya hubungan antara Iran-AS, perilaku Iran terkait dengan aktivitas program nuklir ke depannya atas penarikan diri AS dan terbunuhnya Qasem Soleimani, sanksi ekonomi yang juga kembali diterapkan oleh AS terhadap Iran, hingga stabilitas dan kondusifitas dunia internasional atas kandasnya komitmen pelaksanaan kesepakatan yang ada.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, yang menjadi permasalahan ialah mengenai bagaimana implikasi penarikan diri Amerika Serikat dari Kesepakatan Nuklir Iran/Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA)?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan sumber data sekunder sebagai acuan utama. Metode pendekatan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perjanjian, dan historis. Adapun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk memecahkan persoalan yang diajukan.

Pembahasan

Sejarah Program Nuklir Iran

Timur Tengah seakan sarat dengan konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai, mulai dari konflik internal negara-negara didalamnya, konflik kawasan, hingga konflik yang melibatkan negara-negara non kawasan. Minyak sebagai sumber daya alam yang paling melimpah di kawasan ini menjadikan Timur Tengah tak pernah sepi dari konflik. Berbagai kepentingan negara-negara dari berbagai kawasan di dunia dipenetrasikan ke dalam Timur Tengah dengan berbagai cara. Karena kepentingan-kepentingan tersebutlah, stabilitas di Timur Tengah selalu menjadi sorotan dunia internasional.

Salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang ramai dengan konflik adalah Republik Islam Iran. Iran adalah salah satu negara yang telah melalui rentang sejarah yang panjang. Di masa lalu, Iran yang dahulu dikenal dengan nama Persia merupakan salah satu imperium terbesar di dunia selain Romawi dan Yunani. Selama itu pula bangsa Iran berhasil membangun peradabannya hingga

diakui sebagai salah satu bangsa yang paling ber peradaban dalam sejarah. Iran termasuk bangsa yang diperhitungkan dalam kancah perpolitikan dan peradaban dunia. Silih berganti dinasti menguasai dan memerintah bangsa Iran selama lebih kurang 25 abad, namun tetap saja tidak menghilangkan pengaruh bangsa Iran dalam hal kebudayaan dan peradaban (Mikail & Fathoni, 2019).

Salah satu hal yang paling umum dikenal akan Iran ialah program nuklir negara ini. Menilik masa lalu, program nuklir Iran dimulai sebelum masa Pra-Revolusi Islam. Akar program nuklir Iran berasal dari Amerika Serikat. Tahun 1953, Presiden AS saat itu, Dwight D Eisenhower, membuat program Atom untuk Perdamaian yang menyasar Iran untuk menjalankannya. Program nuklir itu dimulai tahun 1957, dengan pernyataan yang diumumkan oleh kedua negara bahwa "Kesepakatan yang diusulkan ialah untuk kerjasama dalam penelitian dan penggunaan secara damai energi atom" (Greg, 2010). Pada tahun 1967, Iran membeli sebuah reaktor nuklir 5 megawatt yang terletak di Pusat Penelitian Nuklir Teheran, yang hingga kini masih berfungsi.

Program nuklir ini, pada awalnya diindikasikan sebagai sebuah inisiatif untuk memberikan negara-negara dengan teknologi nuklir sipil yang damai dengan harapan mereka tidak akan mengejar program nuklir untuk militer. Namun jika ditelisik lebih dalam, program ini sebenarnya merupakan bagian dari propaganda rezim untuk menyadarkan publik AS tentang resiko dan harapan akan nuklir di masa depan. Selain itu, dinilai ada maksud terselubung mengenai bantuan masif yang diberikan AS kepada Iran terkait dengan program nuklir Iran. AS dianggap membantu program nuklir Iran untuk menopang aliansi militernya dengan Teheran

dan mempengaruhi kebijakan Iran tentang penetapan harga minyak. Para eksportir nuklir berharap bahwa mereka dapat memperoleh manfaat politik dan ekonomi dari bantuan nuklir tanpa berkontribusi terhadap proliferasi nuklir. AS yang saat itu dibawah kepemimpinan Dwight D Eisenhower tahu jika cepat atau lambat negara-negara selain AS atau Rusia akan mengembangkan nuklir sebagai sarana pencarian energi alternatif. Dengan Presiden Shah Reza Pahlevi yang naik kursi kepemimpinan dengan kudeta diam-diam yang dilakukan terhadap perdana menteri terpilih Mohammed Mossadegh dengan bantuan intelijen Inggris dan AS, AS beranggapan bahwa kedekatannya dengan Iran dalam program nuklir merupakan langkah yang tepat.

Saat itu, selain Iran, penerima manfaat program nuklir ini termasuk Israel, India, Pakistan, dengan dukungan Iran yang saat itu masih dipimpin Shah Reza Pahlavi. Di bawah program ini, banyak negara menerima apa yang diterima Iran: reaktor kecil mereka sendiri, bahan bakar sendiri. Sejak pertengahan 1970-an, Iran mulai mengirimkan puluhan siswa Iran untuk belajar tentang nuklir di Massachusetts Institute of Technology (MIT) di AS. Mayoritas siswa ini kemudian kembali ke Iran dan mulai menjalankan program nuklir mereka. Disisi lain, booming minyak di kawasan Timur tengah saat itu memunculkan adanya kekhawatiran bahwa program nuklir Iran akan berubah menjadi program nuklir penuh, yang selain untuk kepentingan sipil, juga akan digunakan untuk kepentingan militer.

Melihat perkembangan program nuklir Iran yang tak sesuai rencana awal, para pejabat Amerika berpikir mereka mungkin membuat kesalahan. Diplomat-diplomat AS mulai bernegosiasi

untuk membatasi program nuklir Iran. Namun, mereka menghadapi masalah bahwa Iran di bawah Presiden Shah Reza Pahlevi bersikeras mereka memiliki hak sama untuk mengembangkan tenaga nuklir seperti negara mana pun. Atas sikap Presiden Shah Reza Pahlevi tersebut, muncul pertanyaan mengenai sikap biasanya terkait dengan program nuklir Iran yang tak sesuai skenario awal. Presiden Shah Reza Pahlevi mulai mencari partner selain AS demi tetap menjaga kestabilan proyek pengembangan nuklir Iran. Ia membeli pembangkit nuklir dari Jerman Timur dan Perancis. Riset di kampus Teheran tetap disokong dana besar, regenerasi ahli nuklir lokal tetap diupayakan. Atas tindakan ini, Presiden Shah Reza Pahlevi terkesan tidak memiliki motif ideologis yang jelas. Ia hanya memanfaatkan jaringannya dengan Barat secara umum untuk kepentingan nuklirnya. Lagi-lagi, tindakan Presiden Shah Reza Pahlevi ini tidak dalam taraf yang dirasakan AS sebagai sebuah ancaman. Hubungan Teheran-Washington tetap mesra selama Pahlevi berkuasa.

Titik balik kemesraan Iran-AS terjadi pada penghujung tahun 1970-an. Sentimen anti-AS (dan juga Barat) menggaung keras dan pada tahun 1979 rezim sekuler yang dipimpin oleh Shah Reza Pahlevi digulingkan dengan adanya revolusi Iran. Iran berubah menjadi negara Islam dibawah pemerintah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pada awalnya, Khomeini tidaklah tertarik dengan program nuklir Iran dengan alasan bahwa program nuklir Iran merupakan pengaruh dari barat. Ketegangan antara Iran-AS yang saat itu bergaung dalam kampanye "Racun Barat" juga begitu kuat di Iran yang membuat Khomeini tak tertarik untuk melanjutkan pengembangan program nuklir Iran. "Racun Barat" adalah istilah

yang dibuat dan digunakan Iran untuk menunjukkan pengaruh Barat yang merusak yang harus ditolak. Khomeini bahkan berencana menjadikan situs nuklir sebagai tempat penyimpanan gandum.

Disisi lain, pada saat itu dalam rentang tahun 1980-an, Iran terlibat perang melawan tetangganya Irak, yang dipimpin Saddam Hussein. Sebagai bagian dari perang itu, Saddam berulang kali membom fasilitas nuklir Bushehr, yang tidak beroperasi pada saat itu. Hubungan antara Iran-AS juga semakin mendidih dengan AS yang mendukung Irak. Dalam periode itu terjadi banyak peristiwa yang meningkatkan eskalasi hubungan tidak harmonis keduanya. Pada 1981 terjadi konflik penyanderaan di mana mahasiswa pro-Khomeini menyerbu Kedutaan AS di Teheran dan menyandera 52 warga AS selama 444 hari. Pada 1984 Iran membuka pusat nuklir baru di Kota Isfahan berkat bantuan Republik Rakyat China. Kemudian pada 1988, AS menembak jatuh pesawat penumpang milik maskapai nasional Iran dan menyebut itu sebagai sebuah kesalahan. AS tidak pernah meminta maaf atas insiden tersebut. Pemerintah AS di bawah kepemimpinan George Bush bahkan menyebut Iran sebagai 'poros kejahatan' bersama Irak dan Korea Utara. Dampak terbesar dari Perang Iran-Irak yang berlangsung dari 1980 hingga 1988 itu ialah terjadinya kekurangan listrik yang parah dan mengerikan di Iran. Akhirnya, para pemimpin Iran memutuskan untuk menghidupkan kembali program nuklir, meskipun alasan pastinya tidak jelas. Namun, ditengarai kembali hidupnya program nuklir Iran setelah mati suri dalam beberapa tahun karena adanya dua motif, yaitu kebutuhan akan listrik yang terganggu secara signifikan akibat perang, dan demi pertahanan

negara di masa depan. Sejak saat itu pula, AS dan negara-negara secara kontinyu melancarkan tuduhan yang secara konsisten juga dibantah Teheran: pengembangan energi nuklir Iran bisa dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal (Gawdat, 2006). Selain tuduhan, AS juga melancarkan ancaman konkret seperti sanksi ekonomi. Pada 14 Maret 2000, misalnya, Presiden AS Bill Clinton mengesahkan UU yang berisi sanksi bagi orang atau organisasi yang memberikan bantuan kepada program nuklir Iran. Sanksi inilah yang kemudian menekan dan mengucilkan Iran dalam kancah internasional, terutama dalam aspek ekonomi dan perdagangan.

Kesepakatan Nuklir Iran / Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

Berpuluh-puluh tahun terkungkung dalam hubungan yang menegangkan dengan Iran, pada tahun 2013, AS yang saat itu dibawah kepemimpinan Barack Obama mencoba menurunkan tensi hubungannya dengan Iran. Usaha ini dilakukan dengan menarik Iran yang saat itu dibawah kepemimpinan Presiden baru Iran, Hassan Rouhani ke dalam langkah-langkah diplomasi. Rouhani beberapa kali menegaskan bahwa negaranya tidak mempunyai niat membangun senjata nuklir. Sejatinya, pemerintah Iran selalu menegaskan program pengayaan uranium dinegaranya dilakukan untuk tujuan damai, tetapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya khawatir Iran berusaha membangun senjata nuklir. Mereka, dan juga komunitas internasional ketar-ketir dengan manuver Iran yang selalu dicurigai sedang mengembangkan uranium untuk merakit senjata nuklir sebagai senjata pembunuh massal.

Atas usaha diplomatis inilah kemudian lahir Kesepakatan Nuklir Iran atau dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan yang digodok sejak 2013 itu memuat poin-poin penting yang dihasilkan berkaitan dengan program nuklir Iran, diantaranya:

1. Level Pengayaan Uranium

Kesepakatan ini membatasi level kemurnian pengayaan uranium hexafluoride, yang menjadi isi dari centrifuges pada 3.67 persen jauh di bawah level 90 persen untuk membuat senjata. Ini juga jauh di bawah level 20 persen, yang telah dicapai Iran sebelum perjanjian nuklir itu. Batasan ini berlaku hingga 15 tahun.

2. Kapasitas Pengayaan

Iran memiliki dua fasilitas pengayaan uranium yaitu Natanz dan Fordow. Fasilitas Natanz terdapat jauh di bawah permukaan tanah. Sedangkan Fordow terletak di dalam sebuah gunung yang tidak aktif. Ini dirancang untuk menghindari serangan udara musuh.

Kesepakatan nuklir ini mengizinkan Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium di Natanz dengan batasan. Perjanjian nuklir ini juga mengatur Fordow menjadi pusat teknologi fisika dan nuklir. Centrifuges nuklir akan digunakan untuk memproduksi isotop, yang bermanfaat untuk kegiatan damai non militer.

3. Stok Uranium

Iran mendapat pembatasan jumlah stok uranium yang diperkaya pada level rendah yaitu 300 kilogram uranium hexafluoride pada level 3.67 persen selama 15 tahun. Sebelum perjanjian ini, Iran memproduksi ber ton-ton uranium yang

diperkaya ini. Setiap kelebihan stok uranium akan diturunkan levelnya hingga ke level alami atau dijual ke negara lain dan ditukar dengan uranium alami.

4. Stok Plutonium

Iran masih jauh dari kemampuan memproduksi senjata berbasis plutonium dibandingkan uranium. Proses pengayaan plutonium dilakukan di fasilitas air berat reaktor Arak. Kesepakatan nuklir ini mengatur inti reaktor dikeluarkan dan diisi dengan beton agar tidak bisa lagi digunakan. Reaktor ini juga didesain ulang agar tidak bisa memproduksi senjata berbasis plutonium.

5. Pengawasan

Pengawasan internasional program nuklir Iran di bawah JCPOA terdiri dari tiga tingkatan: (1) Keamanan Komprehensif Iran - penjaga Perjanjian (CSA) dengan IAEA, yang saat ini mengimplementasikan; (2) Protokol Tambahan (AP) untuk CSA Iran, yang akan diterapkan Iran di bawah JCPOA; dan (3) tambahan langkah-langkah verifikasi di JCPOA (Samore, 2015:31). Pengawasan yang dilakukan oleh IAEA diimplementasikan dalam bentuk Iran akan memberi akses kepada IAEA untuk melakukan berbagai inspeksi dan melakukan ratifikasi atau memaksa masuk ke sebuah fasilitas, bertemu dengan para ilmuwan Iran, tempat-tempat militer dan ke dokumen-dokumen yang selama ini dicurigai Barat sebagai program rahasia pengembangan senjata nuklir Iran. IAEA juga berwenang untuk melakukan pengecekan harian di instalasi Natanz dan Fordow selama 15 tahun. Hal ini sebagai tindak lanjut mengingat pada tahun 2011, Iran telah dilaporkan oleh IAEA bahwa ia telah menyalahgunakan program pengembangan uraniumnya

untuk mengembangkan senjata nuklir, berbeda dengan yang diharapkan dunia.

Sebagai imbalan atas hal-hal tersebut diatas, Iran akan mendapatkan bantuan pemulihan sanksi ekonomi terkait nuklir dari AS, PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Uni Eropa secara bertahap. Iran sebelumnya bisa dikatakan kenyang menerima sanksi ekonomi yang membuat negara tersebut lemah secara ekonomi selama bertahun-tahun mengingat Iran disanksi dalam hal ekspor-impor, pembekuan aset di luar negeri, dan sebagainya.

Kesepakatan nuklir Iran ini oleh beberapa pihak dipandang sebagai salah satu prestasi yang bisa dibanggakan Barack Obama sebagai upaya menurunkan suhu ketegangan kedua negara dan sebagai upaya menahan kondusifitas dunia sedikit lebih lama. Disisi lain, banyak pihak yang tidak menyukai kesepakatan tersebut. Sejak awal perumusannya, kesepakatan nuklir Iran telah membelah opini menjadi pihak yang mendukung dan pihak yang menentang. Di AS sendiri, mayoritas anggota Partai Republik menentang sementara Partai Demokrat mendukungnya. Di Iran, kekuatan modern-reformis menyuarakan persetujuan, namun para garis keras, seperti Garda Revolusi Islam (Guardian of the Islamic Revolution/GIR), memiliki keberatan-keberatannya sendiri. Ditambah, kekuatan oposisi Iran di luar negeri menentangnya. Mereka yakin kesepakatan ini memberikan perpanjangan nafas untuk keberlangsungan Republik Islam, yang menurut mereka, sudah di ambang kehancuran. Kesepakatan nuklir Iran tersebut pun ditentang oleh Donald Trump, presiden AS setelah Barack Obama yang kemudian menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut. Pegantian rezim dari Obama ke Trump berpengaruh kepada perubahan kebijakan politik luar negeri yang ekstrem.

Penarikan Diri AS dari Kesepakatan Nuklir Iran

Kesepakatan nuklir Iran, pada dasarnya sangat bergantung pada keikutsertaan AS didalamnya, mengingat program nuklir Iran merupakan rintisan AS dan AS lah yang memiliki rekam jejak terburuk sepanjang hubungannya dengan Iran. Jika ditelisik, keputusan penarikan diri AS ini bukanlah hal mengejutkan. Presiden Trump sudah berjanji sejak jauh hari, bahkan sejak masa kampanye pemilu 2016 bahwa ia melakukan negosiasi ulang atas kesepakatan nuklir Iran (Kroenig, 2018). Ia juga menyatakan akan menarik AS keluar dari kerangka kerjasama internasional yang membebani, merugikan, dan dianggap kontraproduktif terhadap kepentingan nasional AS, sama seperti ketika Presiden Trump menarik AS keluar dari Kesepakatan Paris 2015 dengan alasan tanggung jawab AS sebagai negara maju untuk menekan angka emisi global dianggap membebani dan merugikan terhadap kegiatan perekonomian AS.

Penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir Iran dianggap sebagai salah satu keputusan terbesar dan paling kontroversial yang dilakukan oleh Trump, apalagi tiga sekutu top AS yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris menentang keputusan tersebut. Penarikan diri AS tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana AS dan negara-negara lainnya mengimplementasikan isi kesepakatan. Kesepakatan ini pada dasarnya membahas manfaat rencana dan prospeknya di masa depan, mengkaji perkembangan keterlibatan ekonomi internasional, dan secara khusus berpendapat bahwa kekuatan barat perlu berbuat lebih banyak untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi konsesi nuklir Iran: jika situasinya tidak segera membaik, maka tidak mungkin bagi AS dan mitranya untuk membantah secara kredibel bahwa mereka tidak melanggar

kesepakatan itu sendiri (Dalton, 2016). Sebelum mantap menarik diri dari kesepakatan, sepanjang beberapa tahun pertama, administrasi Trump menunjukkan dukungan untuk perjanjian tersebut. Pada 10 Februari 2017, setelah pertemuan yang membahas mengenai JCPOA, perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri, Frederica Mogherini, menyatakan bahwa pejabat administrasi AS “meyakinkan” kepadanya bahwa mereka akan sepenuhnya mengimplementasikan JCPOA. Namun, pada tanggal 13 Oktober 2017, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengimplementasikan perjanjian tersebut dalam hukum domestik AS, dan akan mengakhiri kesepakatan nuklir Iran. Selain itu, pada awal 2018, para pejabat AS semakin menunjukkan sikap permusuhan terhadap kesepakatan nuklir Iran.

Dalam penarikan diri yang akhirnya dilakukan tanggal 8 Mei 2018 di White House tersebut, Trump menyatakan dalam pidatonya beberapa pernyataan terkait keputusan untuk menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran tersebut, yaitu diantaranya:

“In fact, the deal allowed Iran to continue enriching uranium and — over time — reach the brink of a nuclear breakout. ...

“The agreement was so poorly negotiated that even if Iran fully complies, the regime can still be on the verge of a nuclear breakout in just a short period of time. The deal’s sunset provisions are totally unacceptable. ...

“If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world’s leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world’s most dangerous weapons.”

“This disastrous deal gave this regime — and it’s a regime of great terror — many billions of dollars, some of it in actual cash — a great

embarrassment to me as a citizen and to all citizens of the United States."

"At the heart of the Iran deal was a giant fiction that a murderous regime desired only a peaceful nuclear energy program. Today, we have definitive proof that this Iranian promise was a lie. Last week, Israel published intelligence documents long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons."

"The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias such as Hezbollah, Hamas, the Taliban, and al-Qaeda."

Mengelaborasi pernyataan Trump tersebut, pertama dapat dijelaskan dengan menelusuri rekam jejak hubungan keduanya dan kedua dengan melihat pada isi kesepakatan dan implementasi dari kesepakatan tersebut. Iran dan AS telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa dekade. Kedua negara memiliki sejarah yang sangat kompleks yang melibatkan kudeta yang diatur oleh CIA pada tahun 1950-an atas perdana menteri terpilih Mohammed Mossadegh, seorang raja boneka pro-Amerika bernama Shah Reza Pahlevi yang digulingkan pada tahun 1979 melalui revolusi Islam, krisis penyanderaan warga AS yang pernah terjadi di kedutaan AS di Teheran, dukungan AS terhadap Irak selama periode perang Iran-Irak, dan sebagainya. Ancaman terus-menerus dari para pemimpin Iran terhadap Israel, sekutu utama Amerika di Timur Tengah, dan nyanyian "matikan Amerika" di jalan-jalan Iran juga semakin memperumit masalah. Dalam konteks program nuklir Iran, ada ketidakpercayaan besar-besaran terhadap Iran di AS (dan sebaliknya), dan AS telah lama mengkhawatirkan apa yang

mungkin terjadi jika rezim Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran membuat langkah besar dalam hal ini pada tahun 2010-an, oleh karena itu upaya pemerintahan Obama untuk mengatur kesepakatan nuklir dituangkan dalam upaya diplomasi. Ketika kesepakatan tersebut akhirnya diselesaikan pada tahun 2015, secara luas dirayakan sebagai pencapaian diplomatik yang luar biasa.

Menganalisis pernyataan-pernyataan Trump dalam pidatonya, dapat dikatakan bahwa kesepakatan tersebut menurutnya adalah kesepakatan sepihak yang mengerikan dan seharusnya tidak pernah dibuat. Ia pun menambahkan bahwa perjanjian itu tidak akan pernah membawa ketenangan, dan tidak akan membawa kedamaian. Selain itu, kesepakatan yang dicapai era Obama itu dianggap “memalukan” untuknya “selaku warga negara”. Sebenarnya, dengan melihat pada implementasi Iran atas kesepakatan tersebut cukup memberikan napas segar bagi kondusifitas internasional. IAEA dalam menjalankan tugasnya di Iran baik itu memasang segel dan pengumpulan foto-foto, pengukuran data dan dokumen telah dilaksanakan dengan baik. Direktur IAEA, Yukiya Amano dalam laporannya menyatakan bahwa Iran melaksanakan komitmennya sesuai yang ada dalam kesepakatan tersebut, dan penting bagi Iran untuk terus melaksanakan kesepakatan tersebut secara penuh. Hanya saja, baik kesepakatan dan implementasi dari kesepakatan tersebut tidak mampu memuaskan dahaga AS. Banyak pejabat (terutama dari kalangan konservatif) di AS masih merasa kesepakatan nuklir Iran tidak cukup untuk membatasi kemampuan negara itu untuk mengembangkan senjata nuklir. Ini karena kesepakatan Iran berisi klausul sunset, atau bagian dari kesepakatan yang pada akhirnya akan berakhir (Tabatai,

2017). Di bawah kesepakatan itu, pembatasan sentrifugal Iran hilang setelah 10 tahun yaitu pada tahun 2025 dan pembatasan pengayaan uranium berakhir setelah 15 tahun sejak kesepakatan tersebut ditandatangani yaitu pada tahun 2030. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa setelah pembatasan ini berakhir, Iran dapat mengembangkan senjata nuklir dengan cepat dan AS harus melakukan tindakan untuk mencegahnya. Kesepakatan ini juga dianggap sebagai sebuah kebohongan, dinegosiasikan dengan sangat buruk, dan hanyalah sebuah fiksi luar biasa yang dibuat oleh rezim pembunuh yang hanya menginginkan program senjata nuklir. Trump juga menyatakan bahwa AS telah memberikan banyak uang kepada Iran, yang pada faktanya ialah uang Iran sendiri. Iran memiliki aset miliaran dolar yang dibekukan di bank asing karena sanksi internasional atas program nuklirnya. Departemen Keuangan AS memperkirakan bahwa Iran akan memiliki lebih dari \$ 50 miliar aset likuid yang dapat digunakan setelah pencabutan sanksi secara luas di bawah ketentuan JCPOA. Bank Sentral Iran mengatakan jumlahnya mencapai \$ 32 miliar. Uang ini juga terkait dengan penyelesaian klaim berusia puluhan tahun antara Amerika Serikat dan Iran. Pada 1970-an, pemerintah Iran yang pro-Barat di bawah Shah Reza Pahlevi membayar \$ 400 juta untuk peralatan militer AS. Namun peralatan tersebut tidak pernah dikirimkan karena kedua negara memutuskan hubungan setelah sandera Amerika disita di Kedutaan Besar AS di Iran. Selain itu, kesepakatan ini juga dianggap tidak mengatur mengenai perilaku Iran atas aktivitas rudal mereka. Atas dasar hal tersebut, AS dibawah Trump pada akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

Implikasi Penarikan Diri AS dari Kesepakatan Nuklir Iran

AS merupakan negara kunci dalam kesepakatan nuklir Iran. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah bahwa program nuklir Iran merupakan rintisan AS, dan AS sendiri lah yang memegang titel musuh terbesar Iran atas konflik nuklir yang telah terjadi selama puluhan tahun itu. Sikap paranoid AS terhadap program nuklir Iran semakin menjadi pasca insiden 9/11. Pasca terjadinya insiden 9/11, kebijakan dan prioritas keamanan nasional AS menjadi lebih rumit dan kompleks bahkan tidak konsisten bukan karena hadirnya ancaman secara langsung dari perang konvensional, namun karakteristik dari ancaman tersebut yang tidak dapat diprediksi. Bagi Washington, keinginannya adalah 'perubahan rezim' di Iran, baik melalui cara militer atau melalui mengobarkan kekacauan internal, dengan harapan akan meledak (Tarock, 2006). Namun, hal itu menjadi lebih rumit pasca terjadinya insiden 9/11 dan perang yang terjadi di Afganistan dan Irak. Fokus AS semakin mengarah pada kekhawatiran yang terus berlanjut terhadap Iran dan Korea Utara akan ancaman teknologi senjata nuklir yang akan membayangi dan menjadi mimpi buruk Amerika Serikat di masa depan.

Mundurinya AS dari kesepakatan nuklir Iran dan penerapan kembali sanksi terhadap Iran akan membuat stabilitas dan kondusifitas dunia menjadi semakin buruk. Program nuklir Iran akan menjadi semakin tidak terkontrol dan tidak terkendali. Hal ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan Iran atas program nuklirnya yang telah melanggar kesepakatan. Pada awalnya, Iran memang berjanji akan berkomitmen untuk tetap melaksanakan kesepakatan bersama dengan negara-negara yang tersisa. Hal ini

didukung dengan pernyataan para ahli yang mengatakan bahwa Iran telah mematuhi perjanjian bahkan setelah AS hengkang dari kesepakatan. Namun Teheran kemudian mengumumkan pada 8 Mei 2019, mereka tidak akan lagi menghormati batas yang ditetapkan oleh kesepakatan. Negeri Persia tersebut juga mengancam akan melangkah lebih jauh dan meninggalkan lebih banyak komitmen nuklir, kecuali mitra yang tersisa –Inggris, China, Prancis, Jerman dan Rusia– membantunya menghindari sanksi, terutama dengan membeli minyaknya. Bagaimanapun, sikap yang ditunjukkan Iran merupakan refleksi atas sanksi-sanksi yang kembali dijatuhkan kepada Iran yang membuatnya semakin berang dan akhirnya memilih untuk tidak lagi mentaati kesepakatan.

Dua tahun setelah sanksi yang terbingkai dalam '*maximum pressure campaign*' yang dijatuhkan Presiden Donald Trump terhadap Republik Islam Iran, telah mendorong Iran ke dalam resesi bertahun-tahun yang dalam, memangkas nilai mata uangnya, meningkatkan inflasi, mengusir investor asing dari Iran, dan merampas pendapatan rezim puluhan miliar dolar, terutama dari ekspor minyak. Tekanan ekonomi ini telah bertransformasi menjadi tekanan politik, yang mungkin memaksa rezim untuk memutuskan antara kelangsungan hidupnya, di satu sisi, dan ambisi nuklirnya serta perang asing di sisi lain. Selama waktu ini pula, aktivitas program nuklir Iran meningkat melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam kesepakatan.

Dalam pernyataan resminya, Iran mengumumkan bahwa mereka akan melampaui batas pengayaan uranium. Hal ini kemudian divalidasi oleh IAEA yang menyatakan bahwa pengayaan uranium Iran melampaui aturan dalam kesepakatan. IAEA mengatakan, para

inspektornya memverifikasi pada Senin, 8 Juli 2019 bahwa Iran telah melampaui batas pengayaan 3,67 persen yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Laporan itu tidak merinci seberapa besar Iran sudah melampaui batas pengayaan. Namun, Associated Press mengutip juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, Senin, yang mengatakan Teheran telah memperkaya uranium dengan kemurnian “sekitar 4,5 persen”. Iran sebelumnya mengatakan dapat memperkaya uranium hingga 20 persen. Selain itu, IAEA melaporkan dalam dokumen rahasia yang dibagikan ke negara-negara anggota dan dilihat kantor berita Associated Press bahwa Iran pada 2 November 2019 memiliki persediaan 2.442,9 kilogram uranium yang diperkaya rendah, naik dari 2.105,4 kilogram yang dilaporkan pada 25 Agustus.

Fakta tersebut membuktikan sikap Iran yang ingin mengurangi komitmennya terhadap perjanjian nuklir. Pada dasarnya, pengayaan uranium hingga 5 persen sudah cukup untuk menghasilkan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun jumlah itu masih jauh di bawah 90 persen yang dibutuhkan untuk membangun senjata nuklir. Bagaimanapun eskalasi pengayaan uranium Iran tetap saja mengkhawatirkan. Langkah itu telah dikecam oleh tiga negara Eropa yang turut serta dalam kesepakatan: Inggris, Prancis, dan Jerman. Sementara China, yang juga turut serta dalam perjanjian, mengatakan semua itu terjadi akibat penarikan diri AS dari kesepakatan. Disisi lain, negara-negara yang tersisa dalam kesepakatan memiliki daya tawar yang rendah untuk memaksa Iran agar tetap mematuhi kesepakatan. Juga, Iran memiliki kompleksitas masalah tersendiri dengan negara-negara yang tersisa. Contohnya, Iran terlibat dalam konflik dengan Inggris atas peristiwa penyitaan kapal tanker Inggris oleh pasukan keamanan Iran.

Pelanggaran Iran atas kesepakatan nuklir yang lahir pada 2015 lalu tidak semata sebagai respon atas sanksi ekonomi yang mendera Iran. Peningkatan aktivitas nuklir Iran yang melebihi batas kesepakatan juga disebabkan oleh beberapa insiden yang terjadi, seperti insiden terbunuhnya Qasem Soleimani, pemimpin pasukan elite Quds yang menjadi bagian Garda Revolusi Iran dalam serangan udara militer AS pada 3 Januari 2020 dan terbunuhnya Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan nuklir Iran pada 27 November 2020 atas serangan yang dicurigai Iran dilakukan oleh anak emas AS yaitu Israel. Atas kedua insiden ini, Iran kembali menegaskan bahwa ia tak akan lagi mematuhi kesepakatan nuklir. Bahkan, belum lama ini yaitu pada tanggal 2 Desember 2020, parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang akan mencegah inspeksi PBB terhadap situs nuklirnya. Undang-undang ini juga mengharuskan pemerintah untuk melanjutkan pengayaan uranium hingga 20% —jauh di atas taraf 3,67% sesuai kesepakatan nuklir Iran— jika rangkaian sanksi yang melumpuhkan Iran tidak dikurangi dalam kurun waktu dua bulan. Uranium yang diperkaya ke tingkat yang jauh lebih tinggi dapat digunakan dalam bom nuklir, meskipun setelah 20% tercapai, secara teknologi lebih mudah untuk mencapai tingkat kemurnian yang dibutuhkan. Tidak sejalan dengan parlemen Iran, Presiden Hassan Rouhani menyatakan dia menentang penerapan undang-undang tersebut, sementara Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang merupakan otoritas tertinggi di negara itu, masih harus menjelaskan posisinya dalam undang-undang tersebut. Menelisik pada dua pemimpin Iran tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya Rouhani lebih menyukai jalur diplomasi, terutama keinginannya untuk melakukan negosiasi

ulang atas kesepakatan nuklir yang ada. Sementara Khamenei tidak menyukai jalur diplomasi, dimana pernyataannya ialah bahwa jalur diplomasi adalah berbahaya. Meskipun undang-undang ini tidak mendapat dukungan dari Rouhani dan Khamenei belum menjelaskan posisinya, dapat kita simpulkan bahwa undang-undang ini lahir sebagai dampak yang timbul atas penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir Iran dan penerapan kembali sanksi terhadap Iran oleh AS.

Menganalisis keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran dengan melihat pada dampak yang ditimbulkan, merujuk pada memo diplomatik yang ditulis mantan duta besar Inggris untuk Amerika Serikat (AS), Kim Darroch yang menggambarkan keputusan Trump sebagai bentuk 'vandalisme diplomatik'. Kekurangan dalam kesepakatan nuklir Iran memang terletak pada adanya klausul sunset. Namun, melihat pada situasi politik global saat ini, Trump seharusnya mampu menyusun strategi jangka panjang. Kesepakatan nuklir Iran merupakan pencapaian yang untuk saat ini seharusnya patut dipertahankan mengingat Iran sebelumnya telah melaksanakan komitmennya dengan baik. Keputusan penarikan diri AS oleh Trump bukan merupakan tindakan yang ideal dan justru merugikan serta kembali meningkatkan tensi ketegangan kedua negara. Tindakan vandalisme diplomatik yang dilakukan Trump, yang tampaknya karena alasan ideologis dan personal - itu adalah kesepakatan Obama, seharusnya tidak perlu terjadi. Melihat situasi saat ini dimana aktivitas nuklir Iran terus meningkat dan ketegangan yang terus terjadi antara Iran dan AS, seharusnya mampu dipahami AS bahwa AS memiliki tanggung jawab atas perdamaian dan

keamanan global. Tindakan penarikan diri AS justru merupakan langkah yang menggoyangkan dan membahayakan stabilitas dan kondusifitas global, terutama jika senjata nuklir Iran-- sesuatu yang selama ini ditakutkan AS-- muncul dan mulai digunakan secara aktif dalam suatu arena bernama perang.

Kesimpulan

Penarikan diri AS oleh Presiden Donald Trump dari kesepakatan nuklir Iran merupakan suatu bentuk 'vandalisme diplomatik' yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kesepakatan nuklir Iran atau yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sejauh ini merupakan instrumen yang mampu membuat Iran tetap berada dibawah kendali berkaitan dengan program nuklirnya. Atas penarikan diri AS tersebut yang disertai dengan penjatuhan kembali sanksi terhadap Iran, membuat Iran melanggar kesepakatan tersebut mengingat sanksi yang dijatuhkan mengacaukan kondisi perekonomian negaranya.

Dalam kesepakatan nuklir Iran, AS adalah juru kunci dalam kesepakatan tersebut mengingat program nuklir Iran berdasarkan fakta sejarah merupakan rintisan AS dan AS adalah negara yang memiliki rekam jejak terburuk dalam hubungannya dengan Iran terkait dengan masalah program nuklir Iran. AS seharusnya mampu memahami bahwa ia memiliki tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan global. AS dibawah Trump seharusnya mampu menyadari bahwa kesepakatan nuklir Iran memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan memelihara stabilitas dan kondusifitas global, dan sentimen pribadi seharusnya tidak perlu dilibatkan dalam *decision making* apabila berkaitan dengan suatu

politik dan kebijakan negara. Selain itu, negara-negara yang tersisa dalam kesepakatan tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk membuat Iran tetap mematuhi dan melaksanakan kesepakatan. Sebagai dampak dari penarikan diri AS, aktivitas nuklir Iran menjadi semakin meningkat melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh kesepakatan. Hal ini membuat ketar-ketar komunitas global dan AS itu sendiri mengenai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Pada akhirnya, keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran adalah tindakan yang justru kontradiktif dengan pernyataan-pernyataannya dalam pidatonya di White House pada 8 Mei 2018 lalu.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Bahgat, G. (2006). Nuclear proliferation: The Islamic Republic of Iran, *Iranian Studies*, 39:3, 307-327.
- Bruno, G. (2010). Iran's Nuclear Program. Council on Foreign Relations.
- Dalton, Sir R. (2016). THE IRAN NUCLEAR NEGOTIATIONS: ONE YEAR ON, *Asian Affairs*, 47:3, 351-365.
- Kroenig, M. (2018). The Return to the Pressure Track: The Trump Administration and the Iran Nuclear Deal, *Diplomacy & Statecraft*, 29:1, 94-104.
- Laub, Z. (2015). The Regional Sanctions Regimen on Iran. Council on Foreign Relations.
- Mehta, RN & Whitlark, RE (2016) Unpacking the Iranian Nuclear Deal: Nuclear Latency and U.S. Foreign Policy, *The Washington Quarterly*, 39:4, 45-61.

- Mikail, K & Fathoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 3:1, 1-16.
- Mousavian, S & Mousavian, M. (2018). Building on the Iran Nuclear Deal for International Peace and Security, *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 1:1, 169-192.
- Nainggolan, P. (2015). Kesepakatan Nuklir Iran dan Implikasinya. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, VII:15, 5-8.
- Paramasatya, S & Wiranto, S. (2019). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XII*, 297-314.
- Purwanto, A. (2011). Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 8:1.
- Samore, G et al. (2015). *The Iran Nuclear Deal: A Definitive Guide*. Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.
- Tabatabai, A. (2017). *Preserving The Iran Nuclear Deal*, CATO Institute
- Tarock, A (2006). Iran's Nuclear Programme and The West, *Third World Quarterly*, 27:4, 645-664.
- Tarock, A. (2016). The Iran Nuclear Deal: Winning a Little, Losing a Lot, *Third World Quarterly*, 37:8, 1408-1424.

Publikasi Daring

- Akhmad Muawal Hasan, 2018. "Nuklir Pernah Dekatkan AS-Iran, Revolusi 1979 Mengubah Segalanya" Tersedia dalam

<https://tirto.id/nuklir-pernah-dekatkan-as-iran-revolusi-1979-mengubah-segalanya-cKht> [diakses pada 7 Desember 2020]

BBC, 2018. "Three reasons behind Trump ditching Iran deal" [daring]. Tersedia dalam <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43902372>[diakses pada 7 Desember 2020]

BBC Indonesia, 2013. "Obama kedepankan diplomasi dengan Iran" Tersedia dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/09/130924_pbb_iran_amerika_nuklir [diakses pada 8 Desember 2020]

BBC Indonesia, 2019. "Kesepakatan nuklir Iran: Mengapa batas pengayaan uranium jadi bagian penting?" Tersedia dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48936047> [diakses pada 7 Desember 2020]

BBC Indonesia, 2019. "Mengapa Iran sengaja melanggar kesepakatan nuklir 2015?" Tersedia dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48899345> [diakses pada 9 Desember 2020]

BBC Indonesia, 2019. "Mengapa Iran sengaja melanggar kesepakatan nuklir 2015?" Tersedia dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48899345> [diakses pada 8 Desember 2020]

BBC Indonesia, 2020. "Iran tolak persyaratan Biden untuk hidupkan kembali kesepakatan nuklir" Tersedia dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55182748> [diakses pada 9 Desember 2020]

BBC Indonesia, 2020. "Jenderal Qasem Soleimani dibunuh, Iran tak lagi patuhi kesepakatan nuklir" Tersedia dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51003594> [diakses pada 8 Desember 2020]

- John Haltiwanger, 2020. "Here's what's in the 2015 nuclear deal with Iran that Trump abandoned and Biden pledged to restore" Tersedia dalam <https://www.businessinsider.com/iran-nuclear-deal-explained?r=US&IR=T>, [diakses pada 9 Desember 2020]
- Kompas, 2020. "Ilmuwan Nuklir Iran Dibunuh dalam Operasi yang "Baru dan Rumit"" Tersedia dalam <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/30/211245670/ilmuwan-nuklir-iran-dibunuh-dalam-operasi-yang-baru-dan-rumit>. [diakses pada 8 Desember 2020]
- Mark Lander, 2018. "Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned" Tersedia dalam <https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html> [diakses pada 7 Desember 2020]
- Republika, 2020. "Nuklir Iran: Diciptakan Amerika, Diributkan Amerika" Tersedia dalam <https://republika.co.id/berita/qdoznr440/nuklir-iran-diciptakan-amerika-diributkan-amerika> [diakses pada 7 Desember 2020]
- Reuters, 2019. "Iran implementing its commitments under nuclear deal, IAEA says" Tersedia dalam <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-iaea-idUSKCN1PO27D> [diakses pada 8 Desember 2020]
- Saeed Ghasseminejad and Richard Goldberg, 2020. "The Impact of Sanctions Two Years After U.S. Withdrawal From the Nuclear Deal" Tersedia dalam <https://www.fdd.org/analysis/2020/05/06/sanctions-impact-two-years-after-jcpoa-withdrawal/> [diakses pada 8 Desember 2020]

- Salvador Rizzo and Meg Kelly, 2018. "Fact-checking President Trump's reasons for leaving the Iran nuclear deal" Tersedia dalam <https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2018/05/09/fact-checking-president-trumps-reasons-for-leaving-the-iran-nuclear-deal/> [diakses pada 7 Desember 2020]
- Selim Celal, 2018. "Apa dampak penarikan diri AS dari perjanjian nuklir terhadap Iran?" Tersedia dalam <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/apa-dampak-penarikan-diri-as-dari-perjanjian-nuklir-terhadap-iran/1169292> [diakses pada 8 Desember 2020]
- Wartaekonomi, 2020. "Iran Siap Bertahan dalam Kesepakatan Nuklir karena Alasan Ini" Tersedia dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read265350/iran-siap-bertahan-dalam-kesepakatan-nuklir-karena-alasan-ini> [diakses pada 9 Desember 2020]
- VOA Indonesia, 2020. "IAEA: Timbunan Uranium Iran Langgar Kesepakatan Atom" Tersedia dalam <https://www.voaindonesia.com/a/iaea-timbunan-uranium-iran-langgar-kesepakatan-atom/5657774.html> [diakses pada 9 Desember 2020]
- Vox, 2018. "Trump's withdrawal from the Iran nuclear deal, explained" [daring]. Tersedia dalam <https://www.vox.com/world/2018/5/8/17328520/iran-nuclear-deal-trump-withdraw> [diakses pada 9 Desember 2020]